



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# ( L K I P )

## TAHUN 2018



## DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	1
<b>KATA PENGANTAR</b>	2
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
C. PERENCANAAN STRATEGI	8
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b>	12
A. PERJANJIAN KINERJA	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
<b>BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. REALISASI ANGGARAN	54
<b>BAB.IV PENUTUP</b>	55
A. KESIMPULAN	55
B. KENDALA YANG DIHADAPI	57
C. SARAN DAN REKOMENDASI	57
<b>Lampiran-Lampiran</b>	52

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-Nya jualah kita dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengembangk amanah dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam mendukung Program Delapan Jalan Masa Depan. Program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berkaitan langsung dengan upaya Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak, dimana hal ini merupakan satu kesatuan dari Program Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerbitan LKIP ini diharapkan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap selanjutnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Bimbingan dan Pembinaan dari Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota , Para Asisten, Staf Ahli Walikota (SAW) dan mitra kerja serta dukungan seluruh staf, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dukungan dan bimbingan lebih lanjut tetap kami harapkan guna perbaikan dan peningkatan mutu tahun berikutnya.

Makassar, Januari 2019  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR

**TENRI A. PALALLO, S.Sos, M.Si**

Pangkat. Pembina TK.I

NIP. 19680412 199603 2 005

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam kapasitas pengembalian amanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018, sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Walikota Makassar, maka rata-rata capaian kinerja 11 Sasaran Strategis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sangat baik dengan rasio pencapaian rata-rata **103,18%**

Secara umum, pencapaian kinerja terbaik yang bisa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Kebijakan Walikota dalam mendukung program-program yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), terbangunnya kerjasama dengan multi stakeholder Pembangunan Kota Makassar, dukungan dan komitmen para Pegawai dalam lingkup DPPPA dalam mendukung peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, komitmen para pihak dalam mendukung kerja-kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dukungan pendanaan dari Pemerintah Kota Makassar.

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik di tahun yang akan datang, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar akan mengambil beberapa langkah strategis berikut:

1. Program yang sama akan dikembangkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif
2. Mendorong SKPD untuk melakukan Gender analisis bukan hanya 1 (satu) program.
3. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota Focal Point

4. Updating data pilah secara berkala
5. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan SKPD
6. Peningkatan kapasitas terhadap anggota Tim Layanan
7. Koordinasi berkelanjutan dengan pihak terkait
8. Kampanye penyadaran tentang isu gender
9. Mendorong SKPD untuk memahami bahwa isu perempuan dan anak sudah menjadi isu bersama

Untuk meraih Kinerja terbaik pada tahun 2018 tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.986.262.207 atau **95,58%** dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 25.095.357.000,-** Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah cukup baik ditunjukkan dari efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut.

Dengan demikian, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan segenap Pimpinan, Pegawai, dan Stakeholders terkait serta Partisipasi masyarakat sendiri.

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Organisasi Perangkat Daerah atau OPD merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui peraturan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan, demikian pula dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar adalah OPD yang dibentuk mengembang amanah membantu Walikota untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Sebagai pengembang amanah DPPPA berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pertama untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

Dasar penyusunan LKIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2018 yang telah disepakati.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8). Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a. **Kepala Dinas,**

b. **Sekretaris,** terdiri atas :

- ✓ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- ✓ Sub Bagian Keuangan;
- ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. **Bidang Kualitas Hidup Perempuan,** terdiri atas :

- ✓ Seksi Pengarusutamaan Gender;
- ✓ Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- ✓ Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga.

d. **Bidang Perlindungan Perempuan,** terdiri atas :

- ✓ Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- ✓ Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- ✓ Seksi Pencegahan Kekerasan Anak.

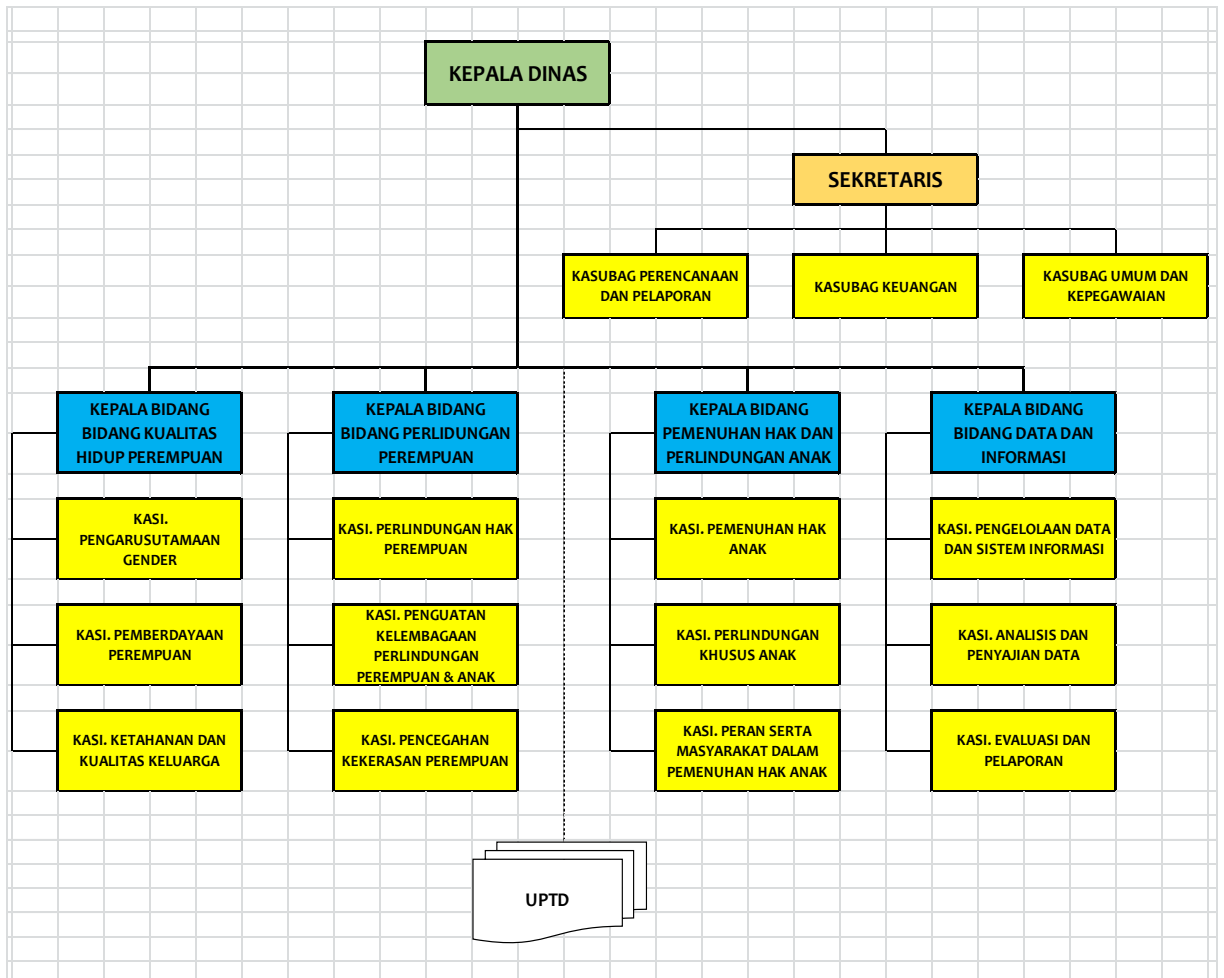
e. **Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,** terdiri atas :

- ✓ Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- ✓ Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- ✓ Seksi Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak.

f. **Bidang Data dan Informasi**, terdiri atas :

- ✓ Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- ✓ Seksi Analisis dan Penyajian Data;
- ✓ Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar bisa dilihat dalam Diagram di bawah ini :





## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

### b. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

## C. PERENCANAAN STRATEGIS

### 1. Visi dan Misi SKPD

Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2014-2019, yakni : **“Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Dalam Segala Aspek Kehidupan Menuju Kota Dunia”**. ada 3 makna yang dapat diambil visi ini yaitu:

- (1) Kesetaraan Gender adalah gambaran tentang proses dan hasil perubahan pada masyarakat Kota Makassar melalui upaya pengarusutamaan gender, untuk mencapai persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
- (2) Perlindungan anak dalam sejumlah aspek kehidupan adalah gambaran tentang proses dan hasil perubahan pada masyarakat Kota Makassar melalui upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- (3) Menuju Kota Dunia adalah misi untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam bentuk 3 Misi sesuai dengan peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut :
  - a) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang.
  - b) Meningkatkan kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak.
  - c) Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

## **2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

### **2.1 Tujuan Strategi SKPD**

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menetapkan tujuan strategi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
2. Terwujudnya sistem pendataan, pemantauan dan evaluasi yang mendukung penyelenggaraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kota Makassar
3. Menegakkan keadilan dan memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban KDRT
4. Melembagakan Pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak.

## **2.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Menyusun dan mengembangkan berbagai kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Makassar
2. Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung penyelenggaraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Kota Makassar.
3. Terwujudnya kebijakan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatkan kemitraan dan kapasitas pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

## **3. Strategi dan Kebijakan SKPD**

Dalam rangka strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan arah kebijakan yang menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai berikut :

1. Akselerasi kesetaraan gender melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan
2. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
3. Membangun sistem perlindungan anak secara terpadu dan komprehensif dalam pencegahan, deteksi dini, pelayanan, dan pemberdayaan melalui penguatan kapasitas dan fungsi kelembagaan pemerintah, masyarakat, dan keluarga (*pro child*)
4. Membangun kemitraan dengan lintas sektor terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

#### **4. Aspek Strategis**

Adapun aspek strategis yang berkenaan dengan pengembangan tugas-tugas dan fungsi tersebut antara lain :

##### **4.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan**

- a. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda dengan dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.
- b. Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, masih terjadi netral gender dan masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
- c. Masih ditemukannya peraturan perundang-undangannya yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak.
- d. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas disemua kalangan.
- e. Partisipan angkatan kerja perempuan yang belum optimal.
- f. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender.
- g. Belum optimalnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam mengenali masalah-masalah gender yang ada.
- h. Partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan.
- i. Masih rendahnya partisipasi perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan hukum.
- j. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan yaitu legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta.

##### **4.2. Urusan Perlindungan Perempuan Dan Anak**

- a. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta KDRT.
- b. Masih tingginya kasus perdagangan perempuan dan anak dibawah umur.
- c. Masih tingginya kasus tenaga kerja anak di bawah umur.

- d. Peraturan perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dari tidak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Kebutuhan tumbuh kembang anak jga belum sepenuhnya mejadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan elaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah.
- e. Belum optimalnya penanganan kekerasan perempuan, anak, KDRT dan kasus *trafficking* serta penanganan kasus-kasus permasalahan anak.

## BAB. II

### PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2018 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan Walikota Makassar. Adapun hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel** : Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018
1	Tersedianya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	90 %
2	Meningkatnya sarana dan prasarana yang representatif	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana dalam Aparatur	95 %
3	Meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal	Indeks kehadiran pegawai	90 %
4	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi di bidangnya	95 %
5	Meningkatnya kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	% capaian kinerja yang termuat dalam citizen charter	100 %
6	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Jumlah Perempuan kepala Rumah Tangga (PKRT) miskin yang diberdayakan	300 orang
7	Pengarustamaan Gender (PUG) terintegrasi dalam Perencanaan Penganggaran OPD	Jumlah dan prosentase SKPD yang perencanaan dan penggarannya responsive gender (PPRG)	40 SKPD
8	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi	Jumlah kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	440 Kasus
9	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak diberbagai bidang	Prosentase Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak	75 % Kelurahan
10	Meningkatnya kesetaraan gender dalam Pembangunan	Indeks pembangunan gender (IPG)	93,58 %
11	Meningkatnya peran Perangkat Daerah dalam penyediaan data gender dan anak	Prosentase ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak	40%

Perjanjian Kinerja tersebut di atas adalah wujud penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2014-2019. Perjanjian Kinerja tahun 2018 ini merupakan penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Selain itu hal ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai upaya memenuhi visi organisasi.

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.

Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcome/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPPPA kedepan baik pengaruh dari luar (*eksternal*) maupun dari dalam (*internal*) DPPPA Kota Makassar, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar Tahun 2014-2019.

Kebijakan umum yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar tahun 2014-2019 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar ada 3 (tiga) misi yaitu antara lain :

- a. Misi kesatu, meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak diberbagai bidang.
- b. Misi kedua, meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak.
- c. Misi ketiga, meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai berikut:

**Tabel :** Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal Priode RPJMD	Target Kinerja Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Priode RPJMD
			Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
1	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100 %	100 %	100%	90%	95%	95%
2	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100 %	100 %	100%	95%	95%	95%
3	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Disiplin berpakaian Dinas	100%	100 %	100 %	100%	90%	95%	95%
4	Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya	1 Tahun	100 %	100 %	1 Tahun	95%	97%	97%
5	% Capaian kinerja yang termuat dalam citizen charter	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT) Miskin yang diberdayakan	300 Org	100 org	200 org	300 Org	300 Org	300 Org	900 Org
7	Jumlah dan prosentase Perangkat Daerah yang perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG)	29 SKPD	8 SKPD	18 SKPD	29 SKPD	40 SKPD	50 SKPD	50 SKPD
8	Jumlah dan Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani	240 Kasus	80 Kasus	160 Kasus	240 Kasus	440 Kasus	640 Kasus	640 Kasus
9	Prosentase Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak	8 Kel.	3 Kel.	5 Kel.	8 Kel.	75%	85%	85%
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	73,95	73,85	73,89	73,95	93,58	93,96	93,96
11	Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak	-	-	-	-	40 %	60 %	60 %



## BAB. III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Walikota Makassar, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai berikut:

##### 1. Tersedianya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Tersedianya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	90	90	100

Realisasi pencapaian kinerja sasaran strategis yang diukur dengan indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100% dengan rasio pencapaian sebesar 100% atau kategori sangat baik. Hal ini mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni sebesar 100% dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Secara umum administrasi perkantoran adalah suatu kegiatan perencanaan keuangan, penagihan dan pencatatan, personalia dan distribusi barang di sebuah organisasi dalam rangka memperlancar dan mendukung kinerja organisasi. Hasil pengukuran kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperoleh Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah dukungan pendanaan, kebijakan pimpinan, komitmen dan kerjasama yang baik antara pegawai dalam lingkup DPPPA dalam menjalankan program dan kegiatan yang ada di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk lebih meningkatkan kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran, maka langkah-langkah strategis ke depan yang akan diambil adalah meningkatkan fungsi dan peran dalam pelayanan administrasi perkantoran di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar.

Untuk mencapai target sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran yang didukung oleh sejumlah kegiatan di antaranya: (1) Penyediaan Jasa Surat menyurat, (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, (3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, (4) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/ teknis lainnya, (5) penyediaan bahan bacaan, (6) Pengelolaan administrasi perkantoran, (7) rapat – rapat koordinasi dan konsultasi daerah, (8) Sosialisasi kerja dan pelayanan publik dan (9) Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan-kegiatan dalam renja tahun 2018 tersebut sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengantar surat menyurat	3 Org	3 Org	100%	3 Org	3 Org	100%	3 Org	3 Org	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Tenaga & bahan bahan kebersihan kantor	2 Org	2 Org	100%	2 Org	2 Org	100%	2 Org	2 Org	100%
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm Kantor/ Teknis Lainnya	Tenaga Kerja Non PNS	14 Org	14 Org	100%	18 Org	18 Org	100%	20 Org	19 Org	95%
Penyediaan Bahan Bacaan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%

Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Terkelolanya Admininstrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Rapat – rapat Koordinasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi antar lembaga	94 Org	94 Org	100 %	94 Org	94 Org	100 %	94 Org	94 Org	100 %
Sosialisai Kinerja Pelayanan Publik	Terpublikasinya kinerja dan pelayanan publik	1 tahun	1 tahun	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %
Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Non PNS yang mendapatkan Premi Asuransi Ketegakerjaan	-	-	-	18 Org	18 Org	100 %	20 Org	19 Org	95 %

Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar pada :

### Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian
1.907.354.900	1.787.807.100	93,73	1.886.367.520	1.794.857.082	95,15	2.006.650.050	1.919.725.000	95,67

## 2. Meningkatnya sarana dan prasana yang representatif

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Meningkatnya sarana dan prasarana yang representatif	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana dalam Aparatur	100	100	100 %	100	100	100 %	90	90	100 %

Dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, dengan Cakupan sarana yang dan prasarana dalam kondisi baik ditargetkan dalam perjanjian kinerja pada awal tahun 2018 sebesar 100% dari jumlah sarana yang tersedia. Sementara realisasinya sebesar 100 % dengan rasio persentase pencapaian sebesar 100% atau kategori sangat baik. Sampai dengan saat ini, jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebanyak 320 dan semuanya dalam kondisi baik. Adapun daftar barang sebagai berikut:

**Tabel : Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk menunjang Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2018**

No	NamaBarang	Jumlah	Baik	Rusak	Ket.
1	Mobil Staion Wagon/Mobil	1	1		2004
2	Mobil Staion Wagon/Mobil	1	1		2015
3	Mobil Staion Wagon/	1	1		2017
4	Mobil Staion Wagon/DAIHATSU LUXIO	1	1		2018
5	KendaraanDinasBermotor Lain-lain/Mobil Daihatsu	1	1		2014
6	Mini Bus ( Penumpang 14 orang kebawah )/Lucio MC M/T	1	1		2016
7	Mini Bus ( Penumpang 14 orang kebawah )/Lucio MC M/T	1	1		2016
8	Mobil bermotorpenumpang lain-lain/Mobil	1	1		2012
9	Sepeda Motor/Sepeda Motor	1	1		1995
10	Sepeda Motor/Sepeda Motor	1	1		2005
11	Sepeda Motor/Sepeda Motor	1	1		2015
12	Sepeda Motor/	1	1		2017
13	Sepeda Motor/	1	1		2017
14	Sepeda Motor/	1	1		2017
15	MesinKetikListrikStandar/MesinKetikListrik	1	1		2013
16	MesinHitungListrik/mesinhitung	1	1		2017
17	RakBesi / Metal/RakBuku	1	1		2014
18	Filling KabinetBesi / Metal/Filling Besi	3	3		2003
19	Filling KabinetBesi / Metal/Filling Besi	1	1		2005
20	Filling KabinetBesi / Metal/Filling Kabinet	4	4		2011
21	Filling KabinetBesi / Metal/Filling Kabinet	1	1		2011
22	Filling KabinetBesi / Metal/Filling Kabinet	1	1		2014
23	Filling KabinetBesi / Metal/Filling kabinet	2	2		2015
24	Filling KabinetBesi / Metal/	2	2		2017
25	Brankas/Brankas	1	1		2013
26	LemariKaca/LemariArsipKaca	4	4		2013
27	LemariArsip/LemariArsipP.K.Drg	2	2		2011
28	LemariArsip/LemariArsip	1	1		2013
29	LemariArsip/LemariArsipKayu	1	1		2013

30	LemariArsip/LemariArsipKayu	3	3		2013
31	LemariArsip/LemariArsip	1	1		2014
32	LemariArsip/LemariPlastik	2	2		2014
33	LemariArsip/LemariArsip	1	1		2015
34	AlatPenghancurKertas/	1	1		2017
35	Proyektor / Infokus/Infokus	1	1		2009
36	CCTV/CCTV	1	1		2014
37	LemariKayu/LemariKayu	1	1		2010
38	LemariKayu/lemarikantor	1	1		2016
39	TempatTidurKayu ( Lengkap )/TempatTidur	4	4		2013
40	MejaRapat/MejaRapat	1	1		2009
41	MejaTulis/MejaKerja	4	4		2014
42	MejaMakan/MejaMakan	1	1		2013
43	MejaPanjang/	7	7		2017
44	KursiRapat/KursiRapat	12	12		2009
45	KursiRapat/KursiRapat	3	3		2010
46	KursiRapat/KursiRapatMerkJiro-S	25	25		2018
47	KursiTamu/KursiTamu	1	1		2014
48	KursiTamu/Kursitamu	1	1		2015
49	KursiTangan/KursiKerja	10	10		2014
50	KursiPutar/KursiPakaiTangan	3	3		2001
51	KursiPutar/KursiPutar	2	2		2002
52	KursiPutar/KursiPutar	1	1		2006
53	KursiPutar/KursiPutar	2	2		2011
54	Meja Biro/Meja ½ Biro	2	2		2006
55	Meja Biro/Meja ½ Biro	1	1		2006
56	Meja Biro/Meja ½ Biro	3	3		2010
57	Meja Biro/MejaKerja	6	6		2013
58	Meja Biro/Meja ½ Biro	13	13		2016
59	Kursi Sofa/Sofa	1	1		2013
60	LemariPakaian/LemariPakaian	2	2		2013
61	MoubilerLainnya/KursiKerja	3	3		2010

62	MoubilerLainnya/KursiKerja	5	5		2013
63	MoubilerLainnya/Rak TV	1	1		2014
64	KursiKerja/	18	18		2017
65	LemariEs/Kulkas	1	1		2011
66	LemariEs/KulkasFortable	1	1		2011
67	LemariEs/Kulkas	1	1		2013
68	LemariEs/Kulkas	1	1		2014
69	LemariEs/	1	1		2016
70	LemariEs/	1	1		2017
71	AC Unit/AC	1	1		2011
72	AC Unit/AC	2	2		2012
73	AC Unit/	3	3		2017
74	AC Split/AC Spilit	1	1		2007
75	AC Split/AC Spilit	1	1		2007
76	AC Split/AC Split	1	1		2015
77	AC Split/	1	1		2016
78	AC Split/	2	2		2016
79	KipasAngin/KipasAngin	2	2		2013
80	Kompom Gas/Kompom Gas	1	1		2013
81	Tabung Gas/Tabung Gas	1	1		2013
82	Televisi/Televisi	1	1		2011
83	Televisi/	1	1		2017
84	Televisi/TV LCD	1	1		2012
85	Televisi/TV 21 Inchi	1	1		2013
86	Televisi/TV	1	1		2014
87	Televisi/	1	1		2016
88	Camera Film/	1	1		2017
89	Dispenser/Dispenser	1	1		2011
90	Dispenser/Dispenser	1	1		2013
91	PC Unit/Komputer PIV	1	1		2009
92	PC Unit/Computer	2	2		2013
93	PC Unit/Komputer All In One	1	1		2013

94	PC Unit/Komputer	1	1		2014
95	PC Unit/Komputer All In One	1	1		2014
96	PC Unit/PC Unit	7	7		2015
97	PC Unit/PC Unit	2	2		2015
98	Note Book/	1	1		2016
99	PC Unit/PC Unit	1	1		2015
100	PC Unit/	2	2		2016
101	PC Unit/	1	1		2016
102	PC Unit/	1	1		2016
103	PC Unit/	1	1		2016
104	PC Unit/	1	1		2016
105	Lap Top/	3	3		2017
106	Lap Top/laptop Asus Core i3-SHARED 14 inch	10	10		2018
107	Lap Top/Laptop APPLE Macbook Pro	2	2		2018
108	Note Book/Komputer Notebook	1	1		2009
109	Note Book/Komputer Notebook	1	1		2009
110	Note Book/Komputer Notebook	2	2		2010
111	Note Book/Notebook	5	5		2013
112	Note Book/Note Book	1	1		2014
113	Note Book/Note Book	6	6		2015
114	Note Book/	1	1		2016
115	Personal Komputer Lain-lain/	4	4		2017
116	Printer/	3	3		2017
117	Printer/	1	1		2017
118	Scanner/Scan Dokumen Epson	1	1		2018
119	Printer/Printer	1	1		2011
120	Printer/Printer INKIRT	1	1		2013
121	Printer/Printer Inkjet	1	1		2014
122	Printer/Printer	1	1		2014
123	Printer/Printer	1	1		2014
124	Printer/Printer	1	1		2015
125	Printer/Printer	8	8		2015

126	Printer/Printer	1	1		2015
127	Printer/	4	4		2016
128	Printer/	1	1		2016
129	Printer/	1	1		2016
130	Peralatan Personal Komputerlainnya/UPS ICA 682 B	1	1		2010
131	MejaKerjaPejabatEselon II/MejaPimpinan + M.samping	1	1		2010
132	KursiKerjaPejabat Lain-Lain/	10	10		2016
133	Proyektor + Attachment/	1	1		2016
134	Proyektor + Attachment/layarproyektor	1	1		2016
135	Unintemuptible Power Supply (UPS)/ouptop	2	2		2016
136	Camera Digital/Kamera Digital	1	1		2012
137	Camera Digital/	1	1		2016
138	Pesawat Telephone/Telepon	1	1		2006
139	Handy Talky ( HT )/Handy Talky	1	1		2009
<b>JUMLAH</b>		320	320		

Sumber : Data Pengurus Barang DPPP Kota Makassar 2018

Perlengkapan dan peralatan kerja yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2014 – 2019 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka capaian kinerja sasaran strategis di atas adalah sebesar 100% atau kategori sangat baik

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah dukungan pendanaan yang cukup serta kebijakan pimpinan. Untuk lebih meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, maka langkah-langkah strategis ke depan yang akan diambil adalah mengusulkan penggaran yang cukup dalam rangka penyediaan sarana dan prasaran penunjang kinerja para pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Untuk mencapai target sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang didukung oleh sejumlah kegiatan di antaranya: (1) pengadaan komputer (2) Pengadaan Meja dan kursi kerja/ rapat (3) Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan, (4) pemeliharaan rutin/ berkala alat angkutan darat bermotor, (5) pemeliharaan rutin berkala komputer (6) Pemeliharaan rutin berkala bangunan gedung tempat kerja, (7) penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan-kegiatan dalam renja tahun 2018 tersebut sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>
Pengadaan Alat Kantor	Tersedianya peralatan Kantor	-	-	-	4 Unit	2 Unit	50%	-	-	-
Pengadaan Alat Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-
Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer	5 Unit	5 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	13 Unit	118%
Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat	Tersedianya meja dan kursi kerja/ rapat	23 Buah	23 Buah	100%	25 Buah	25 Buah	100%	25 Buah	25 Buah	100%
Pengadaan Alat Studio	Tersedianya alat studio	3 Unit	3 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat angkutan darat bermotor	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%	11 Unit	11 Unit	100%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/ Berkala alat kantor	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala komputer	Terpeliharanya Komputer	39 Unit	39 Unit	100%	39 Unit	39 Unit	100%	39 Unit	39 Unit	100%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi	Pemanfaatan kendaraan lancer	6 Unit	6 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%
Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Tersedianya data Aplikasi Sistem Informasi Manajemen	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/berkala Aplikasi Sistem Informasi Manajemen	Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen (SIM)	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-

Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar pada :

### Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian
661.373.190	651.373.190	98,48	845.830.776	759.379.590	89,78	514.394.980	470.886.470	91,54

### 3. Meningkatnya Aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal	Indeks kehadiran pegawai	100	95,68	95,68	100	100	100%	90	90	100%

Meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal, dilihat dari indeks kehadiran pegawai. Dari target kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 90%, telah terealisasi sebesar 90% sehingga rasio pencapaiannya sebesar 100% atau kategori sangat baik. Rata-rata ketidakhadiran pegawai tanpa keterangan dalam setahun sebesar 6,8 hari/orang dari 55 pegawai yang terdiri dari 26 pegawai negeri sipil dan 20 tenaga kontrak.

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2014 – 2019 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka capaian kinerja sasaran strategis di atas adalah sebesar 100% atau kategori baik.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah dukungan pendanaan yang cukup, komitmen pimpinan dalam melakukan kontrol terhadap para pegawai serta kesadaran para pegawai akan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk lebih meningkatkan disiplin aparatur, maka langkah-langkah strategis ke depan yang akan diambil adalah menyiapkan dukungan pendaan, pengawasan dan kontrol pimpinan terhadap kinerja pegawai dilakukan secara rutin serta meningkatkan kesadaran para pegawai terkait peran dan tanggung jawabnya.

Dalam mencapai sasaran ini telah dilaksanakan program Peningkatan Disiplin Aparatur yang didukung oleh kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada renja tahun 2018 tersebut sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tarb get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks kehadiran pegawai	100	95,68	95,68	100	97,16	97,16	90	90	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas	100	95,68	95,68	46 stel	46 stel	100%	55 Stel	55 Stel	100%

Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar pada :

#### Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian
19.000.000	19.000.000	100	28.500.000	28.500.000	100	27.500.000	27.500.000	100

#### 4. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi di bidangnya	80	100	125	90	100	125	95	95	100%

Dari 55 pegawai yang terdiri dari 34 pegawai negeri sipil dan 21 tenaga kontrak, sebanyak 52 orang atau 95% telah mengikuti pelatihan yang kompeten sepanjang tahun 2018 baik yang dilaksanakan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun instansi lainnya. Jika dibandingkan dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja sebesar 95% maka diperoleh rasio pencapaian sebesar 100% atau kategori sangat baik. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2014 – 2019 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka capaian kinerja sasaran strategis di atas adalah sebesar 100% atau kategori sangat baik.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah dukungan pendanaan, kebijakan pimpinan, serta adanya kesempatan yang sama bagi pegawai untuk mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik yang dilaksanakan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun yang dilaksanakan oleh pihak lain.

Sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Makassar kedepan. Untuk itu setiap tahunnya telah terus menerus melakukan upaya peningkatan dan penguatan kapasitas sumber daya aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam mewujudkan cita-cita Walikota selaku kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, sebagai berikut :

**Tabel :** Data Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	P	L	Jumlah (orang)
1	ASN (Aparatur Sipil Negara)	26	8	34
2	Tenaga Kerja Kontrak (Non PNS)	17	4	21
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>12</b>	<b>55</b>

Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, maka langkah-langkah strategis ke depan yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah tetap memberikan kesempatan yang sama kepada para pegawai baik yang berstatus ASN maupun Non PNS untuk mengikuti sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang baik yang dilaksanakan oleh DPPPA maupun Stakholder lainnya.

Dalam mencapai sasaran ini telah dilaksanakan program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dengan pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada renja tahun 2018 sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Ta get	Reali sasi	% Ca paian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya	80	100	125	90	100	125	95	95	100%
Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mengikuti diklat	80	100	125	100	100	100	30 org	30 org	100%

Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar pada :

#### Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian
285.000.000	262.261.000	92,02	300.000.000	270.618.960	90,21	330.000.000	297.476.200	90,14

## 5. Meningkatnya kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Ta get	Realis asi	% Ca paian	Tar get	Realis sasi	% Ca paian	Targ et	Realis sasi	% Ca paian
Meningkatnya kualitas capaian laporan kinerja dan Keuangan	% capaian kinerja yang termuat dalam citizen charter	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%

Persentase capaian kinerja yang termuat dalam *citizen charter* Tingkat capaian indikator persentase capaian kinerja yang termuat dalam *citizen charter* sebesar 100% Hal ini dilihat dari *citizen charter*/kontrak pelayanan yang ditandatangani oleh Walikota Makassar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar beserta tokoh/pemuka masyarakat.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia yang nyaman untuk semua, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar komitmen untuk melakukan hal-hal berikut; (1) pemberian bantuan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (2) pemberian sarana terhadap kelompok estetika lingkungan. Hal-hal tersebut telah dilakukan dan terpublikasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kami atas tingkat kepuasan pelayanan masyarakat terkait dua hal yang menjadi komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, diperoleh hasil memuaskan atau 100%.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja indicator kinerja utama sasaran strategis tersebut adalah kerjasama yang baik antara pegawai dalam lingkup DPPPA dalam menjalankan program dan kegiatannya yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Hal ini juga di dukung oleh sejumlah dokumen yang direncanakan dan hasilnya semua dapat terselesaikan selesaikan di antaranya dokumen RKA-SKPD, dokumen DPA-SKPD, dokumen Renja SKPD, dokumen Lakip-SKPD, Dokumen TAPKIN/Perjanjian Kinerja SKPD, Laporan Keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset SKPD serta dokumen-dokumen yang lainnya.

Keberhasilan ini didukung oleh kerja sama yang baik dalam tim Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar serta dukungan dari *stakeholder* Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2014-2019, maka rata-rata tingkat capaian sasaran strategis adalah sebesar 100% atau kategori sangat baik.

Untuk lebih Meningkatnya kualitas capaian laporan kinerja dan Keuangan, maka langkah-langkah strategis ke depan yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah lebih meningkatkan kerjasama antar pegawai serta lebih meningkatkan sinergiritas antar bidang dalam menjang fungsi dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam mencapai sasaran strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah melaksanakan program peningkatan pengelolaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang didukung oleh sejumlah kegiatan diantaranya: (1) Penyusunan RKA-SKPD, (2) Penyusunan DPA-SKPD, (3) Penyusunan RENJA SKPD, (4) Penyusunan Lakip-SKPD, (5) Penyusunan TAPKIN-SKPD, (6) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusunan aset SKPD (7) Pengelolaan Keuangan SKPD (8) Peningkatan kinerja Pelayanan dan administrasi.

Adapun pencapaian target kinerja dari sasaran renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 sebagai berikut :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Kelengkapan Laporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan RKA-SKPD tahunan	100%	100%	100%	2 Keg	2 Keg	100%	2 Dok	2 Dok	100%
Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan RKA-SKPD tahunan	100%	100%	100%	2 Keg	2 Keg	100%	2 Dok	2 Dok	100%
Penyusunan Renja	Tersedia dokumen RENJA	100%	100%	100%	2 Keg	2 Keg	100%	2 Dok	2 Dok	100%

Penyusunan LAKIP	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	100%	100%	100%	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
Penyusunan TAPKIN-SKPD	Tersedianya dokumen penetapan kinerja	100%	100%	100%	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
Penyusunan Renstra	Tersedia dokumen RENSTRA	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
Peny lap. Keu semesteran, lap. Perhitungan penyus. Asset SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun	100%	100%	100%	2 Keg	2 Keg	100%	2 Dok	2 Dok	100%
Pengelolaan keuangan SKPD	Peningkatan kinerja & Kesejahteraan pengelolaan keuangan SKPD	100%	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi	Meningkatnya kinerja pelayanan dan administrasi	100%	100%	100%	4 Keg	4 Keg	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar pada :

#### Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Capaian
524.600.000	519.799.600	99,08	534.200.000	532.867.500	99,75	507.800.000	462.960.000	91,17

#### 6. Meningkatnya kualitas hidup perempuan

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Realisasi	% Capaian	Tar get	Realisasi	% Capaian	Tar get	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Jumlah Perempuan kepala Rumah Tangga (PKRT) miskin yang diberdayakan	200 org	235 org	117,50	300 org	400 org	133,33	300 org	300 org	100

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan yang kurang menguntungkan dari berbagai aspek kehidupan.



Program Pemerintah Kota Makassar dalam Pemberdayaan Perempuan terus selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Salah satu program yang ada adalah program peningkatan kualitas hidup dengan sasaran strategis Meningkatnya perlindungan perempuan dan keterampilan perempuan.

Adapun pencapaian kinerja sasaran ini mencapai target, dimana tingkat capaian kinerja ini diukur dengan Jumlah perempuan kepala Rumah tangga miskin yang diberdayakan, dimana Target yang diperjanjikan antara Walikota Makassar dengan kepala Dinas Pemberdayaan dan Pelindungan Anak pada awal tahun 2018 sebanyak 300 Orang, sementara realisasinya sebanyak 300 orang dengan rasio pencapai sebesar 100%.

Factor keberhasilan ini didukung anggaran yang memadai, adanya sistem pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan, adanya akses yang sama diberikan kepada masyarakat, tim pengelola kegiatan memiliki kapasitas yang memadai, serta tingginya minat masyarakat (PKRT) untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Sehingga kegiatan yang direncanakan demi peningkatan aspek pengetahuan dan keterampilan PKRT dapat dijalankan dengan baik.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis di atas telah dilaksanakan Program peningkatan kualitas hidup didukung oleh sejumlah kegiatan yaitu; (1) Peningkatan peran dan kualitas bagi ibu rumah tangga, (2) Pembinaan kelompok perempuan dalam pembinaan kelurahan terpadu, (3) Peningkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3), (4) Pelatihan keterampilan kelompok Pemberdayaan Perempuan, (5) Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelola usaha, (6) Peningkatan SDM perempuan pesisir dan pulau, (7) Operasional Pokjandal Posyandu. Adapun pencapaian indikator kinerja pada Renja tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Program Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin yang Diberdayakan	200 orang	235 orang	117,5	300 orang	400 orang	133,33	300 org	300 org	100
Peningkatan peran dan kualitas bagi ibu rumah tangga	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Peran dan Kualitas Bagi Ibu Rumah Tangga	200 orang	400 orang	200	450 org	450 org	100	300 org	300 org	100
Pembinaan kelompok perempuan dalam pembinaan kelurahan terpadu	Jumlah anggota Kelompok Perempuan yang dibina dalam pembinaan kelurahan terpadu	200 orang	200 orang	100	50 RT	50 RT	100	50 RT	50 RT	100
Pembinaan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS)	Terlaksananya penyuluhan bagi keluarga prasejahtera	100 orang	100 orang	100	100 RT	100 RT	100	-	-	-
Peningkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)	Jumlah Rumah Tangga Prasejahtera yang mengikuti Pembinaan dalam Kegiatan P2K3	-	-	-	-	-	-	100 RT	100 RT	100
Pelatihan keterampilan kelompok Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kelompok Perempuan Yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan	300 orang	300 orang	100	500 orang	500 orang	100	600 orang	600 orang	100
Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelola usaha	Jumlah perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha	300 orang	300 orang	100%	300 org	300 org	100%	400 org	400 org	100%
Pelatihan tata rias wajah bagi perempuan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Keterampilan	-	-	-	200 orang	200 orang	100	-	-	-
Pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga bagi PKRT	Jumlah PKRT yang mendapatkan Pelatihan	-	-	-	200 orang	200 orang	100	-	-	-
Peningkatan SDM perempuan pesisir & pulau	Jumlah SDM PKRT Pesisir dan Pulau	-	-	-	300 orang	300 orang	100	600 orang	600 orang	100
Lokakarya manajemen kelompok Majelis Taklim	Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya	-	-	-	300 orang	300 orang	100	-	-	-
Operasional Pokjnal Posyandu.	Jumlah Posyandu Binaan yang dilatih	-	-	-	46 posya ndu	46 posya ndu	100	46 posya ndu	-	-

Pencapaian indikator kinerja Renja yang tertera diatas dengan target sebesar 300 orang. Sementara realisasinya 300 orang PKRT miskin yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan, diberdayakan dari target 300 orang dengan rasio pencapaian sebesar **100%** (300 orang : 300 orang x 100 ). Realisasi dan Target Program secara keseluruhan sebanyak **1.650** orang. Hal ini disebabkan oleh semua kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik. Berikut kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPPA :

Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Keterangan
Peningkatan peran dan kualitas bagi ibu rumah tangga	300 Orang	Keterampilan
Pembinaan kelompok perempuan dalam pembinaan kelurahan terpadu	50 RT/org	Pembinaan
Pelatihan keterampilan kelompok Pemberdayaan Perempuan	600 Orang	Pelatihan
Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelola usaha	400 Orang	Pelatihan
Peningkatan SDM perempuan pesisir dan pulau	300 Orang	Keterampilan
<b>JUMLAH</b>	<b>1.650</b> Orang	

**Faktor Pendorong** : - Ketersediaan Anggaran yang memadai  
 - Sistem pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan  
 - Adanya akses yang sama diberikan kepada masyarakat  
 - Tim Pengelola kegiatan memiliki kapasitas  
 - Tingginya minat masyarakat (PKRT) untuk terlibat dalam kegiatan

**Faktor Penghambat** : -

**Rencana Tindak Lanjut** : Program yang sama akan dikembangkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif

**PencapaianTarget** : Jumlah Perempuan kepala rumah tangga miskin yang diberdayakan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar pada :

## Program Peningkatan Kualitas Hidup

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian
1.716.750.500	1.761.050.500	99,96	3.160.817.300	3.158.062.200	99,91	2.689.092.450	2.474.600.450	92,02

### 7. Pengarustamaan Gender (PUG) terintegrasi dalam Perencanaan Penganggaran OPD

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Pengarustamaan Gender (PUG) terintegrasi dalam Perencanaan Penganggaran OPD	Jumlah dan prosentase SKPD yang perencanaan dan penggarannya responsive gender (PPRG)	18 SKPD	22 SKPD	122,22	29 SKPD	50 SKPD	172,41	40 SKPD	50 SKPD	125

Pengarustamaan gender (gender mainstreaming) adalah menjadikan gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Gender sebagai konstruksi sosial budaya yang menyebabkan perbedaan gender dan ketimpangan gender dijadikan sebagai salah satu faktor dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan. Untuk menjadikan gender sebagai faktor atau arus utama dalam setiap perencanaan pembangunan dan kebijakan.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG). PPRG bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja, dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisis gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran (input, output dan outcome) serta mengintegrasikan aspek keadilan sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Dengan Anggaran Responsive Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja.

Adapun pencapaian kinerja sasaran ini melebihi dari target, tingkat capaian kinerja sasaran ini diukur dengan Jumlah SKPD yang perencanaan dan penggarannya responsive gender, dimana SKPD telah menggunakan alat analisis gender seperti GBS (*gender analalisis patway*), GBS (*gender budged statement*) dan KAK (*kerangka acuan kerja*) dalam menyusun program di SKPDnya masing-masing.

Target yang diperjanjikan antara Walikota Makassar dengan kepala dinas pemberdayaan dan perlindungan anak pada awal tahun 2018 sebanyak 40 SKPD sementara realisasinya sebanyak 50 SKPD (semua SKPD), yang perencanaan dan penggarannya responsive gender dengan rasio pencapain sebesar 125%.

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2014 – 2019, dimana target pada akhir pada tahun kelima sebanyak 52 SKPD, maka capaian kinerja sasaran strategis di atas adalah sebesar 96,15 %. Pencapaian pada renstra tidak mencapai 100% disebabkan terjadi pengurangan jumlah dari 52 SKPD menjadi 50 SKPD.

Perencanaan dan penggaran responsive gender yang ada disetiap SKPD masih perlu terus ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Saat ini penggunaan alat analisis gender dalam menyusun perencanaan dan penganggarannya masih terbatas pada 1 - 2 program. Kedepannya diharapkan agar kualitas dan kuantitas perencanaan responsive gender semakin membaik, maka diharapkan seluruh program yang ada SKPD telah menggunakan alat analisis gender, selain itu pada saat penyusunan renja dan restra SKPD juga menggunakan alat analisis gender.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator kinerja utama sasaran strategis tersebut adalah ketersediaan anggaran yang memadai, adanya sistim pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan, kelembagaan PUG yang aktif, adanya Surat Edaran Walikota tertakait dengan Percepatan PPRG di SKPD, tim pengelola kegiatan memiliki kapasitas yang memadai, adanya Coaching Corner PPRG, serta adanya technical assitan dan pelatihan yang melibatkan pihak eksternal untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsip gender di Kota Makassar. Adapun faktor penghambat yang dirasakan dalam mencapai target kinerja tersebut adalah masih terbatasnya SDM terlatih di SKPD serta masih terbatasnya ketersediaan data pilah di semua SKPD.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program keserasian kebijakan kualitas Anak dan Perempuan yang didukung oleh sejumlah kegiatan diantaranya : (1) Sosialisasi pengarusutamaan gender (2) Koordinasi dan Pelatihan perencanaan penganggaran responsive gender (3) Koordinasi penguatan kelembagaan PUG (4) Coaching Corner Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Adapun pencapaian indikator pada renja tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah dan % SKPD yang Perencanaan dan Penganggarnya Responsive Gender (PPRG)	18	22	122,22	29	50	172,41	40	50	125%
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	600 orang	600 orang	100%	300 orang	300 orang	100%	300 orang	300 orang	100%
Koordinasi dan Pelatihan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah Peserta (Perempuan dan Laki laki) mengikuti pelatihan PPRG	52 SKPD	52 SKPD (180 org)	100%	400 orang	400 orang	100%	400 orang	400 orang	100%
Koordinasi Penguatan Kelembagaan PUG	SKPD yang telah melaksanakan PUG	180 org	180 org	100%	160 orang	160 orang	100%	120 orang	120 orang	100%
Coaching Corner Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Terfasilitasnya Coaching Corner Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	-	-	-	-	-	-	120 orang	120 orang	100%

Indikator kinerja pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilihat dari indikator program/ kegiatan SKPD Responsif Gender ditargetkan sebanyak 40 SKPD dan realisasinya sebanyak 50 SKPD. Hasil pencapaian yang tercantum dalam tabel di atas tergolong amat baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase rasio pencapaian kinerja sebesar **125 % (50 SKPD : 40 SKPD x 100 )**.

Keberhasilan ini didukung oleh sejumlah kegiatan beserta komitmen SKPD untuk lebih mengoptimalkan agar semua SKPD memahami pentingnya pelaksanaan perencanaan anggaran responsif gender.

- Faktor Pendorong** : - Ketersediaan Anggaran yang memadai  
 - Sistem Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan  
 - Kelembagaan PUG aktif  
 - Adanya Surat Edaran Walikota kepada semua SKPD  
 - Tim Pengelola kegiatan memiliki Kapasitas  
 - Adanya Technical Assistan, Pelatihan yang melibatkan Pihak Eksternal  
 - Adanya Coaching Corner
- Faktor Penghambat** : - Masih terbatasnya SDM terlatih di SKPD  
 - Masih terbatasnya ketersediaan data pilah di semua SKPD
- Rencana Tindak Lanjut** : - Mendorong SKPD untuk melakukan Gender analisis bukan hanya 1(satu) program.  
 - Pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota Focal Point  
 - Updating data pilah secara berkala  
 - Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan SKPD
- PencapaianTarget** : Jumlah SKPD yang penganggarnya responsif gender dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas telah direalisasikan anggaran sebesar pada :

#### Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2017		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian
862.090.200	829.159.900	96,18	1.454.539.557	1.453.934.180	99,96	983.663.350	966.863.350	98,29

## 8. Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi	Jumlah kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	160 Kasus	271 Kasus	169,37	240 Kasus	440 Kasus	183,33	440 Kasus	479 Kasus	108,86

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat sengsara atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi.

Sementara kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak-anak atau kekuasaan.

Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan baik pada ranah domestic maupun ranah publik, salah satu program pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu pembentukan P2TP2A di setiap provinsi dan kabupaten kota. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, merupakan salah satu P2TP2A yang relatif maju di Indonesia.

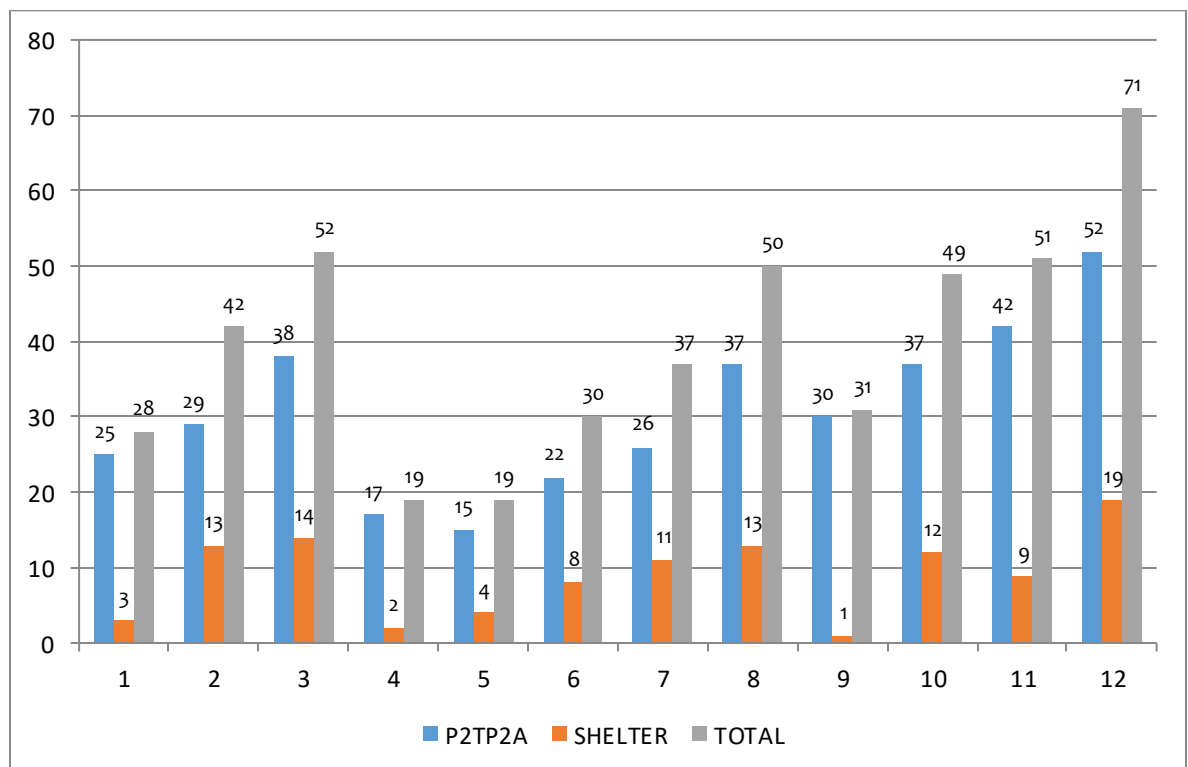
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengkoordinasikan P2TP2A Kota Makassar, yang kini dikelola secara profesional dengan menghimpun berbagai potensi dan sumber daya dalam memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar.



Profesi dan sumberdaya yang terhimpun dari berbagai unsur, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Resort Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Pengadilan Negeri Kota Makassar, psikolog, advokat, pekerja sosial dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pemerhati anak dan perempuan serta LSM yang bergerak dalam advokasi perbaikan kebijakan dan layanan publik.

Adapun pencapaian kinerja sasaran ini melebihi dari target, tingkat capaian kinerja sasaran ini dapat diukur dengan Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani, dimana target yang diperjanjikan antara walikota Makassar dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada awal tahun 2017 sebanyak 440 kasus sementara realisasinya sebanyak 479 kasus dengan rasio pencapai sebesar 108,86%.

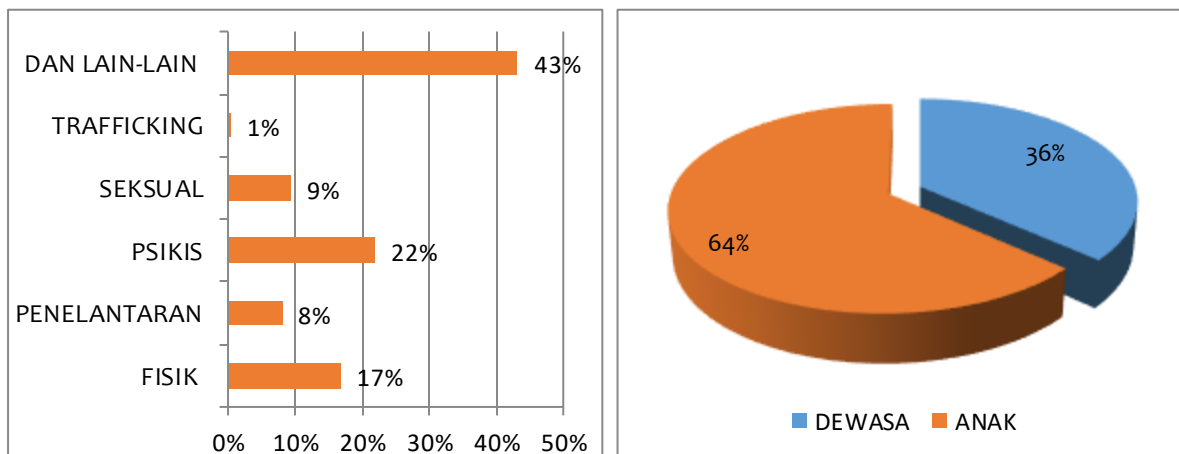
Berikut gambaran kasus yang ditangani oleh P2TP2A dan shelter Warga sepanjang tahun 2018



Sumber Data P2TP2A DPPPA Kota Makassar 2018

Dalam periode Januari – Desember 2018, jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A dan Shelter Warga Kota Makassar sebanyak 479 kasus. Kasus kekerasan terbanyak ditangani pada bulan Maret sebanyak 52 Kasus (38 kasus ditangani oleh P2TP2A dan 14 Kasus ditangani Shelter Warga), menyusul pada bulan Desember sebanyak 71 Kasus (52 kasus ditangani oleh P2TP2A dan 19 Kasus yang di tangani oleh Shelter Warga), Sementara kekerasan terendah yang dialami oleh perempuan dan anak pada bulan April yakni sebanyak 19 kasus (17 kasus ditangani oleh P2TP2A dan 2 Kasus yang di tangani oleh Shelter Warga).

Sepanjang tahun 2018 P2TP2A menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 370 kasus. Berikut grafik persentase kasus berdasarkan kategori umur dan jenis kekerasan.



Sumber Data P2TP2A DPPPA Kota Makassar 2018

Dari 370 kasus yang ditangani oleh P2TP2A sepanjang tahun 2018 sebanyak 36% (135 kasus) kategori umur dewasa dan 64% (235 kasus) umur anak-anak.

Pencapaian ini dapat terjadi disebabkan beberapa faktor pendukung antara lain: saat ini penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dilakukan secara terpadu dalam P2TP2A, serta mengoptimalkan peran shelter warga dan pelayanan TRC P2TP2A 24 jam dalam melaksanakan pelayanan cepat dan aman bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Selain itu juga ditunjang dengan Sosialisasi P2TP2A kepada masyarakat baik lewat media cetak dan elektronik, maupun lewat pertemuan langsung dengan masyarakat. serta kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara tim P2TP2A dan

sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPPA Kota Makassar juga ikut berkontribusi dalam pencapaian target dari indikator kinerja ini.

Selain itu program ini juga berkontribusi dalam pencapaian penghargaan provinsi tahun 2018 dimana Kota Makassar sebagai kemajuan terbaik dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Serta Makassar sebagai kota inovator pembentukan Tim Reaksi Cepat P2TP2A dan Shelter Warga dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

Ketersediaan Anggaran yang memadai, adanya Tim Kerja (Gugus Tugas Trafficking, P2TP2A, Shelter Warga, TRC, PATBM, Paralegal), Sistem pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan, Sumberdaya yang tersedia pada Tim Kerja telah memiliki kapasitas sesuai Tupoksi, Keanggotaan Tim Kerja merupakan representasi dari berbagai pihak (Aparat Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, NGO, SKPD Terkait, dan Ormas), Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan P2TP2A semakin tinggi, serta Ketersediaan lembaga layanan di level kelurahan, memudahkan masyarakat untuk melaporkan/mengakses layanan selain itu kesuksesan ini juga ditunjang dengan Sosialisasi P2TP2A kepada masyarakat baik lewat media cetak dan elektronik, maupun lewat pertemuan langsung dengan masyarakat. serta kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara tim P2T2A. dan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar juga ikut berkontribusi dalam pencapaian target dari indikator kinerja ini. Adapun Faktor Penghambat yang dirasakan adalah Jumlah SDM yang tersedia masih terbatas.

Untuk lebih meningkatkan kualitas perlindungan dan keterampilan perempuan, maka langkah-langkah strategis ke depan yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah lebih mengoptimalkan peran P2TP2A dan pegawai dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta membangun sinergitas dan jejaring dengan para pihak, lebih mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak, menyiapkan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi kelompok perempuan dan anak, serta adanya dukungan pendanaan yang memadai.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program penguatan kelembagaan anak dengan sejumlah kegiatan antara lain : (1) Fasilitas pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), (2) Fasilitas gugus tugas trafficking, (3) Fasilitas upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan, (4) Penyediaan dan Pengelolaan Shelter (Rumah Aman), (5) Peningkatan kapaasitas pendamping KTP/A, (6) Sosialisasi P2TP2A di Kecamatan, (7) Focus Group Discussion (FGD) kekerasan HIV AIDS, (8) Bina Keluarga Lansia, (9) pemenuhan hak dan perlindungan kelompok disabilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (10) Pelatihan pengelolaan shelter warga, (11) Sosialisasi shelter warga, (12) Fasilitasi shelter warga (13) Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (14) Workshop Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan-kegiatan dalam renja tahun 2018 tersebut sebagai berikut :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Kekerasan terhadap perempuan & Anak yang ditangani	160	271	169,3	240	440	183,3	440	479	108,8
Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Terbentuknya jejaring pelayanan terpadu	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Fasilitasi Gugus Tugas Trafficking	Terkoordinasinya pencegahan & Penanganan jejaring trafficking	4 Keg.	4 Keg.	100%	3 Keg.	3 Keg.	100%	3 Keg.	3 Keg.	100%
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan	Jumlah korban yang tertangani	160 Kasus	271 Kasus	169,3	160 Kasus	204 Kasus	127,5%	200 Kasus	200 Kasus	100%
Penyediaan dan Pengelolaan Shelter (Rumah Aman)	tersedianya rumah aman (shelter) bagi korban	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
Peningkatan Kapasitas Pendamping KTP/A	Jumlah pendamping yang terlatih	400 org	400 org	100%	400 org	400 org	100%	400 org	400 org	100%
Sosialisasi P2TP2A diKecamatan	Tersosialisasinya P2TP2A di Kecamatan	400 orang	400 orang	100%	750 orang	750 orang	100%	600 orang	600 orang	100%

Focus Group Discussion (FGD) Kekerasan dan HIV AIDS	Kekerasan dan HIV	100 Org	100 Org	100%	500 Org	500 Org	100%	300 Org	300 Org	100%
Bina Keluarga Lansia	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Keluarga Bina Lansia	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Disabilitas bagi Perempuan dan anak korbankekerasan	Terpenuhinya hak dan perlindungan kelompok disabilitas	200 orang	200 orang	100%	200 orang	200 orang	100%	200 orang	200 orang	100%
Pelatihan pengelolaan shelter warga	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Shelter Warga	-	-	-	300 orang	300 orang	100%	400 orang	400 orang	100%
Sosialisasi shelter warga	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Shelter Warga	-	-	-	500 orang	500 orang	100%	500 orang	500 orang	100%
Fasilitasi shelter warga	Jumlah Shelter Warga yang difasilitasi	-	-	-	6 Kel.	8 Kel.	133%	8 Kel.	8 Kel.	100%
Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	-	-	-	1 Dok	1 DOK	100%
Workshop Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti workshop Kekerasan dan Perkawinan Dini	-	-	-	-	-	-	300 Org	300 Org	100%

Pencapaian ini dapat terjadi disebabkan beberapa faktor pendukung antara lain: saat ini penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dilakukan secara terpadu di dalam P2TP2A dan Shelter Warga. Sosialisasi P2TP2A di Kecamatan maupun lewat media cetak dan elektronik kepada Masyarakat berjalan baik serta kerja sama yang terkoordinasi oleh tim P2TP2A. Selain itu, sejumlah kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ikut berkontribusi dalam pencapaian target dari indikator kerja ini. Hal ini dapat dilihat dari persentase rasio pencapaian kinerja sebesar 108,86 % (440 kasus : 479 kasus x 100 ).

Tabel : Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak ditangani oleh P2TPA dan Shelter Warga

SUMBER	JENIS KEKERASAN	LAYANAN	BULAN																								JUMLAH	TOTAL	
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12				
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	DEWASA	FISIK DEWASA	L	0	2	0	1	0	4	0	1	0	1	0	2	0	6	0	2	0	2	0	5	0	2	0	1	0	29
		R	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	
		PENELANTARAN DEWASA	L	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	10
		PSIKIS DEWASA	L	0	2	0	3	0	7	0	3	0	2	0	5	0	6	0	4	0	8	0	6	0	6	0	7	0	59
		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SEKSUAL DEWASA	L	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TRAFFICKING DEWASA	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DAN LAIN-LAIN DEWASA	L	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	9	
	JUMLAH	L	0	5	0	10	0	16	0	6	0	3	0	8	0	13	0	6	0	11	0	12	0	8	0	8	0	106	
	R	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	3	0	2	0	11	0	29		
	ANAK	FISIK ANAK	L	0	1	1	0	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	8	5
		R	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4
		PENELANTARAN ANAK	L	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	2	2	0	1	8	6	
		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PSIKIS ANAK		L	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	2	1	3	0	1	1	0	2	1	2	3	8	14		
R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEKSUAL ANAK		L	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	1	6	1	21		
R		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	4		
TRAFFICKING ANAK		L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DAN LAIN-LAIN ANAK	L	14	0	5	3	4	8	4	2	7	3	5	0	5	0	15	0	12	1	12	0	20	4	17	0	120	21		
R	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0		
JUMLAH	L	15	3	6	6	7	11	6	5	7	5	5	3	9	2	16	4	14	5	15	7	25	7	21	10	146	68		
R	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	4	0	0	0	0	0	2	0	13	8			
TOTAL	L	15	8	6	16	7	27	6	11	7	8	5	11	9	15	16	10	14	16	15	19	25	15	21	18	146	174		
R	0	2	3	4	1	3	0	0	0	0	2	4	2	0	3	8	0	0	0	3	0	2	2	11	13	37			
SHELTER WARGA	LAKI	L	1		7		3		0		1		7		3		0		5		4		5		36	0	36		
	PEREMPUAN	L	2		6		11		2		4		7		4		10		1		7		5		14	0	73		
	JUMLAH	L	1	2	7	6	3	11	0	2	0	4	1	7	4	3	10	0	1	5	7	4	5	5	14	36	73		
TOTAL	L+R	16	12	16	26	11	41	6	13	7	12	8	22	18	19	22	28	14	17	20	29	29	22	28	43	195	284	479	

Sumber Data P2TP2A DPPP Kota Makassar 2018

- Faktor Pendorong** :
- Ketersediaan Anggaran yang memadai
  - Adanya Tim Kerja (Gugus Tugas Trafficking, P2TP2A, Shelter Warga, TRC, PATBM, Paralegal)
  - Sistem Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan
  - Sumberdaya yang tersedia pada Tim Kerja telah memiliki kapasitas sesuai Tupoksi
  - Keanggotaan Tim Kerja merupakan representasi dari berbagai pihak : Aparat Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, NGO, SKPD Terkait, dan Ormas.
  - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan P2TP2A semakin tinggi
  - Ketersediaan Lembaga Layanan di level Kelurahan, memudahkan masyarakat untuk melaporkan/ mengakses layanan

- Faktor Penghambat** : - Belum semua Kelurahan memiliki Kelembagaan Layanan  
 - Jumlah SDM yang tersedia masih terbatas
- Rencana Tindak Lanjut** : - Peningkatan kapasitas terhadap anggota Tim Layanan  
 - Membentuk Lembaga Layanan di setiap Kelurahan yang beluma ada  
 - Koordinasi berkelanjutan dengan pihak terkait
- PencapaianTarget** : Jumlah Kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dibagi jumlah kekerasan perempuan dikali 100%

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar pada :

**Program Perlindungan Perempuan dan Anak**

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian
3.074.683.800	2.935.611.450	97,40	4.547.412.139	4.496.580.000	98,88	3.860.772.170	3.778.910.975	97,88

**9. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak diberbagai bidang**

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak diberbagai bidang	Prosentase Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak	5	7	140	8	21	262,5	75% Kel.	75% Kel.	100

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian.

Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat. Dalam paragraf ke-7 Konvensi Hak-Hak Anak PBB (The United Nations Convention on the Rights of the Child) menyebutkan “...anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat...”

Indonesia sebagai negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 36/1990 bukan untuk menambah jumlah instrumen internasional menyangkut hak asasi manusia yang diratifikasi, melainkan suatu kesadaran, dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. Dengan mengikat diri dalam KHA, Indonesia turut serta bersama bangsa-bangsa di Dunia mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak.

Dalam rangka pemenuhan hak-hak anak diberbagai bidang maka sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2014 mendeklarasikan menuju Kota Layak Anak. Deklarasi menuju KLA diperlukan sebagai komitmen pemerintah kota untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki untuk menjadikan Makassar sebagai Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sistem pembangunan kota berbasis hak anak menempatkan anak dalam arus utama pembangunan. Hak dan perlindungan anak dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga kota yang dibangun tidak bersahabat dengan anak, tetapi menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Untuk menuju menjadi KLA sejumlah prasyarat harus dipenuhi. Salah satunya mewujudkan kelurahan layak anak.

Adapun pencapaian kinerja sasaran ini melebihi dari target, tingkat capaian kinerja sasaran ini dapat diukur dengan Jumlah Kelurahan Layak Anak dimana target yang diperjanjikan sebanyak 75% dari jumlah Kelurahan sementara realisasinya sebanyak 75% (115) kelurahan layak anak dengan rasio pencapaian sebesar 100%



Kelurahan ini dikategorikan sebagai kelurahan layak anak dimana ditunjang oleh beberapa indikator seperti tersedianya kelembagaan ramah ( puskesmas rama anak, sekolah ramah anak, Shelter Warga, PATBM, Forum Anak, Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak), tersedianya ruang laktasi, tersedianya ruang bermain untuk anak.

Indikator Kinerja Program diukur dari jumlah kelurahan layak anak, dengan target kinerja 75% atau sebanyak 115 Kelurahan dan telah terealisasi sebanyak 115 Kelurahan atau dengan capaian 100 %.

Adapun Indikator Kelurahan Layak Anak adalah sebagai berikut :

a) Penguatan kelembagaan

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum anak dan kelompok lainnya
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan
5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

b) Adapun 5 klaster tersebut diatas sebagai berikut :

- **Klaster I** : Hak sipil dan kebebasan
  1. Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akte kelahiran
  2. Tersedia fasilitas informal layak anak
  3. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di Kota, Kecamatan dan Kelurahan
- **Klaster II** : Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
  1. Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun
  2. Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan perawatan anak
  3. Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak
- **Klaster III** : Kesehatan dasar dan kesejahteraan
  1. Angka kematian bayi (AKB)
  2. Prevelensi kekurangan gizi pada balita
  3. Persentase ASI eksklusif
  4. Jumlah pojok ASI
  5. Persentase imunisasi dasar lengkap

6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
  7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
  8. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
  9. Tersedianya kawasan tanpa rokok
- **Klaster IV** : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
    1. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
    2. Persentase wajib belajar 12 tahun
    3. Persentase sekolah ramah anak
    4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
    5. Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
  - **Klaster V** : Perlindungan khusus
    1. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan
    2. Persentase kasus anak berhadapan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative Justice)
    3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
    4. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Merujuk indikator tersebut di atas pada tahun 2018 telah terealisasi sebanyak 115 Kelurahan yang dianggap menuju Kelurahan Layak Anak.

Selain itu program ini juga berkontribusi pada salah satu pencapaian keberhasilan Kota Makassar yakni pada tahun 2018 Kota Makassar berhasil mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Kota Layak Anak kategori Madya dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia.

Keberhasilan ini didukung oleh Ketersediaan Anggaran yang memadai, Sistem pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan, Kelembagaan Forum Anak di level Kota, kecamatan dan kelurahan cukup aktif, Adanya Gugus Tugas KLA di level Kota, Kecamatan dan Kelurahan, Keterlibatan SKPD terkait, serta Adanya program yang relevan oleh pihak eksternal (lembaga internasional, dan lokal).

Selain itu keterlibatan *stakeholder* yang ada di Kota Makassar dalam menopang kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mewujudkan kota layak anak. Adapun faktor penghambat yang dirasakan adalah SDM masih rendah untuk program anak, anggaran program anak di level kelurahan belum tersedia serta anak masih dianggap belum memiliki kemampuan.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyiapkan dukungan pendanaan yang memadai, mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak, membangun komitmen para pihak, melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang ada di Kota Makassar, Kampanye penyadaran terhadap masyarakat tentang keberadaan anak, Serta Pentingnya mendorong program KLA untuk dianggarkan di level kelurahan dalam mewujudkan kota layak anak.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program penguatan kelembagaan anak dengan sejumlah kegiatan antara lain : (1) Penguatan dan Pengembangan Forum Anak, (2) Festival Forum Anak Makassar (3) Sosialisasi kota layak Anak (4) Pembinaan Kelembagaan Anak (5) Pembinaan Karakter dan Kepribadian Anak (6) Pembinaan Anak-anak Prasejahtera (7) Pemanfaatan taman Tematik yang Layak Untuk Anak (8) Fasilitasi kelurahan Layak Anak (9) Fasilitasi Pemberdayaan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (10) Layanan Integtarif Anak (11) Sosialisasi pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak (12) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Penyandang Disabilitas bagi Anak Korban Kekerasan (13) Pelatihan layanan komprehsip bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah (14) Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak (15) Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan-kegiatan dalam renja tahun 2018 tersebut sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
<b>Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Anak</b>	<b>Jumlah Kelurahan Layak Anak</b>	5 Kel	7 Kel.	140	8 Kel	21 Kel.	262,5	75%	75%	100
Penguatan dan Pengembangan Forum Anak	Jumlah anak forum yang diikuti di Kecamatan	300 orang	300 org	100%	300 orang	300 org	100%	1050 orang	1050 orang	100%
Festival Forum Anak Makassar	Jumlah Anak yang Berpartisipasi	200 orang	200 org	100%	450 orang	450 org	100%	300 orang	300 orang	100%
Sosialisasi kota layak Anak	Tersosialisasinya Kota Layak Anak	500 orang	500 org	100%	840 orang	840 org	100%	500 orang	500 orang	100%
Pembinaan Kelembagaan Anak	Jumlah Lembaga yang akan dibina	143 kel	143 kel	100%	143 kel	143 kel	100%	16 lem baga	16 lem baga	100%
Pembinaan Karakter dan Kepribadian Anak	Jumlah anak yang mendapat pembinaan	200 orang	200 org	100%	450 orang	450 org	100%	300 orang	300 orang	100%
Pembinaan Anak-anak Prasejahtera	Jumlah anak yang mendapat pembinaan	200 orang	200 org	100%	750 orang	750 org	100%	300 orang	300 orang	100%
Pemanfaatan taman Tematik yang Layak Untuk Anak	Jumlah taman tematik yang dimanfaatkan untuk anak	3 kel	3 kel	100%	4 kel	4 kel	100%	2 kel	2 kel	100%
Fasilitasi kelurahan Layak Anak	Jumlah Kelurahan menuju Layak Anak	-	-	-	-	-	-	11 Kel	11 Kel	100%
Fasilitasi Pemberdayaan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Pemberdayaan anak terpadu berbasis masyarakat	-	-	-	-	-	-	14 Kel	14 Kel	100%
Layanan Integtarif Anak	Terbangunnya koordinasi layanan integratif anak	-	-	-	-	-	-	4 Keg	4 Keg	100%
Sosialisasi pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	-	-	-	-	-	-	200 org	200 org	100%
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Penyandang	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemenuhan hak	-	-	-	-	-	-	200 org	200 org	100%

Disabilitas bagi Anak Korban Kekerasan	anak dan perlindungan anak									
Pelatihan layanan komprehsip bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah	Jumlah petugas sekolah mengikuti pelatihan layanan komprehsip bagi anak berkebutuhan khusus	-	-	-	-	-	-	100 org	100 org	100%
Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah program kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	1 Dok.	1 Dok	100%	1 Dok.	1 Dok	100%	10 Kel.	10 Kel.	100%
Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Kebijakan Kota Layak Anak							1 Dok	1 Dok	100%

- Faktor Pendorong** :
- Ketersediaan Anggaran yang memadai
  - Sistem Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan
  - Kelembagaan Forum Anak di level Kota, Kecamatan dan Kelurahan cukup aktif
  - Adanya Gugus Tugas KLA di level Kota, Kecamatan dan Kelurahan
  - Keterlibatan SKPD terkait
  - Adanya program yang relevan oleh Pihak Eksternal (lembaga internasional, dan lokal)
- Faktor Penghambat** :
- SDM masih rendah untuk Program Anak
  - Anggaran program anak di level Kelurahan belum tersedia
  - Anak masih dianggap belum memiliki kemampuan
- Rencana Tindak Lanjut** :
- Pembinaan berkelanjutan
  - Pentingnya mendorong Program KLA untuk dianggarkan di level Kelurahan
  - Kampanye penyadaran terhadap masyarakat tentang keberadaan anak
- PencapaianTarget** : Jumlah Kelurahan Layak Anak dibagi jumlah kelurahan dikali 100

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar pada :

## Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Anak

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian
1.813.346.200	1.813.346.200	100	2.529.687.850	2.479.933.690	97,76	4.094.602.250	3.977.631.444	97,14

### 10. Meningkatnya kesetaraan gender dalam Pembangunan

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

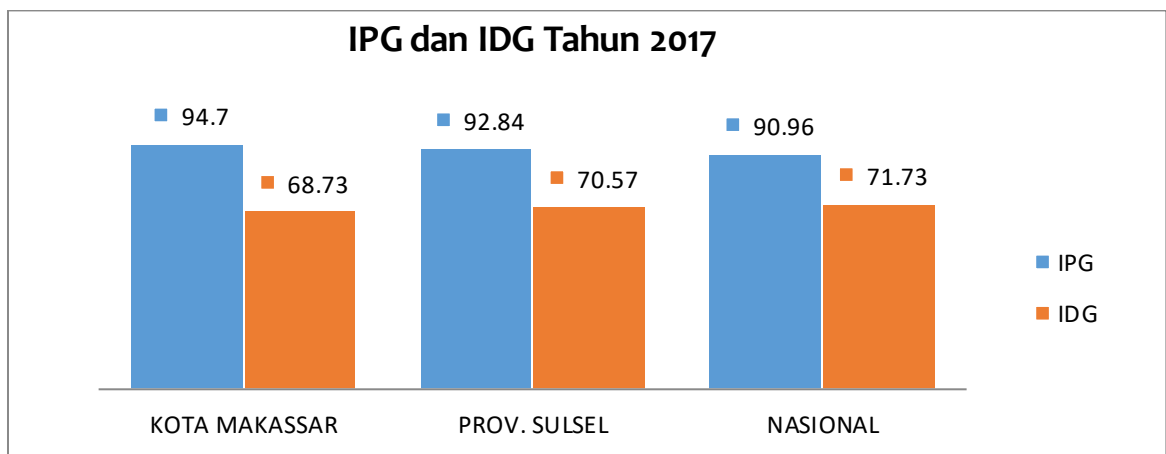
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Meningkatnya kesetaraan gender dalam Pembangunan	Indeks pembangunan gender (IPG)	73,89	74,59	100,95	73,95	93,96	127	93,58	94,70	101,19

Gender dibedakan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat kultur, maupun negara. Oleh sebab itu untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Indeks pembangunan gender merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Dari Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani bersama antara Walikota Makassar dengan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar pada awal tahun 2018. adapun pencapaian kinerja sasaran ini melebihi dari target, tingkat capaian kinerja sasaran ini dapat diukur dengan Peningkatan Indeks Pembangunan Gender dimana target yang diperjanjikan sebesar 93,58 %, sementara realisasi sebesar 94,70% deng rasio pencapai sebesar 101,19%.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan - BPS Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Makassar melampaui rata-rata Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana IPG Kota Makassar mencapai 94,70 dan Nasional sebesar 90,96 dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 92,84 Sementara untuk Indeks Development Gender (IDG), Kota Makassar masih diatas rata-rata provinsi dan sedikit dibawah rata-rata nasional. Yakni IDG Kota Makasaar sebesar 68,73, Nasional 71,74 dan provinsi sebesar 70,57 (berikut grafik IPG dan IDG )



Sumber Data : IPG dan IDG Kementerian PPA tahun 2017

Membangun Kesetaraan gender dan Keadilan Gender tidak mudah dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya dan cenderung patriarki. Kesetaraan dan keadilan gender pada praktiknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundang-undang yang dihasilkan negara maupun lingkungan bermasyarakat.

Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program-program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah.

Namun hal ini belum dapat berjalan secara maksimal karena terkait beberapa kendala yang ada, baik dari segi agama maupun kebijakan politik. Walaupun demikian pencapaian IPG Kota Makassar menunjukkan keberhasilan.

Pencapaian IPG Kota Makassar saat ini telah melampaui target renstra dalam periode 5 tahun. Dimana target kinerja pada priode akhir Renstra 2014-2019 sebesar 93,96 Sementara pencapai IPG tahun ini sebesar 94,70. Lebih **0,74** Point. Akan tetapi pencapain ini tetap harus di pertahankan kedepannya. Untuk lebih meningkatkan dan mempertahankan pencapain yang ada maka pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan perempuan akan terus diperjuangkan demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan geder.

Keberhasilan ini didukung oleh Ketersediaan Anggaran yang memadai, Sistem pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan, Kelembagaan Forum Anak di level Kota, kecamatan dan kelurahan cukup aktif, Adanya Gugus Tugas KLA di level Kota, kecamatan dan kelurahan, Keterlibatan SKPD terkait, serta Adanya program yang relevan oleh pihak eksternal (lembaga internasional, dan lokal). Selain itu keterlibatan *stakeholder* yang ada di Kota Makassar dalam menopang kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mewujudkan kota layak anak. Adapun faktor penghambat yang dirasakan adalah SDM masih rendah untuk program anak, anggaran program anak di level kelurahan belum tersedia serta anak masih dianggap belum memiliki kemampuan.

Ketersediaan Anggaran yang memadai, Sistem pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan, Isu gender sudah jadi isu prioritas pihak lain, Isu gender sudah jadi isu prioritas Pemerintah Kota Makassar,

Adanya program rutin yang diinisiasi oleh DPPPA dan melibatkan semua pihak, danya program yang relevan oleh pihak eksternal (lembaga internasional, dan lokal), sementara factor penghambat yang dirasakan masih kentalnya budaya patriarkhi di masyarakat, masih adanya anggapan bahwa isu perempuan dan anak hanya urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyiapkan dukungan pendanaan yang memadai, mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak, membangun komitmen para pihak, melakukan kampanye penyadaran tentang isu gender, serta mendorong SKPD untuk memahami bahwa isu perempuan



dan anak sudah menjadi isu bersama dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan didukung berbagai kegiatan antara lain : (1) Pembinaan Organisasi Perempuan, (2) Pembinaan TP-PKK Kota Makassar, (3) Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan, (4) Workshop Lorong Berspektif Gender, (5) Workshop Perempuan Penggerak Lorong. Adapun pencapaian target kinerja pada RENJA Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 sebagai berikut :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
<b>Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>Indeks pembangunan gender (IPG)</b>	<b>73,89</b>	<b>74,59</b>	<b>100,95</b>	<b>73,95</b>	<b>93,96</b>	<b>127</b>	<b>93,58</b>	<b>94,70</b>	<b>101,19</b>
Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	2400 Org	2400 org	80%	2000 Org	1600 org	80%	1400 org	1400 org	100%
Pembinaan TP-PKK Kota Makassar	Terlaksananya Pembinaan 10 Program Pokok PKK	-	-	-	15 Kec	15 Kec	100%	15 Kec	15 Kec	100%
Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah Peserta Pelatihan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	200 Org	200 Org	100%	200 Org	200 Org	100%	500 Org	500 Org	100%
Workshop Lorong Berspektif Gender	Jumlah Peserta Workshop Lorong Berspektif Gender	-	-	-	500 Org	500 Org	100%	500 Org	500 Org	100%
Workshop Perempuan Penggerak Lorong	Terlaksananya Workshop Perempuan Penggerak Lorong	-	-	-	300 Org	300 Org	100%	300 Org	300 Org	100%
Workshop Pembuatan Souvenir Perkawinan Khas Kota Makassar	Jumlah Peserta Workshop	-	-	-	500 Org	500 Org	100%	-	-	-

- Faktor Pendorong** :
- Ketersediaan Anggaran yang memadai
  - Sistem pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan
  - Isu Gender sudah jadi Isu Prioritas Pihak lain

- Isu gender sudah jadi isu prioritas Pemerintah Kota Makassar
- Adanya Program rutin yang diinisiasi oleh DPPPA dan melibatkan semua pihak
- Adanya Program yang relevan oleh pihak eksternal (lembaga internasional, dan lokal)

**Faktor Penghambat** : - Masih kentalnya budaya patriarkhi di masyarakat  
 - Masih adanya anggapan bahwa isu perempuan dan anak hanya urusan DPPPA.

**Rencana Tindak Lanjut** : - Kampanye penyadaran tentang Isu Gender  
 - Mendorong SKPD untuk memahami bahwa isu perempuan dan anak sudah menjadi isu bersama

**PencapaianTarget** : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar pada :

**Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian
2.576.065.900	2.542.385.900	98,69	6.627.638.984	6.456.366.684	97,41	5.769.382.950	5.547.935.000	96,16

**11. Meningkatnya peran Perangkat Daerah dalam penyediaan data gender dan anak**

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Meningkatnya peran Perangkat Daerah dalam penyediaan data gender dan anak	Prosentase ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak	-	-	-	-	-	-	40%	40%	100

Data memiliki potensi yang signifikan dalam memberikan manfaat baik pemerintah atau masyarakat. Sinergi antara pemerintah sebagai penyedia data, dan masyarakat sebagai penggunaanya akan terbangun ketika data pemerintah dapat

diakses dengan mudah dan dapat digunakan kembali dengan tujuan inovasi dan kolaborasi.

Data gender dan anak sangat penting sebagai bahan informasi dalam mengambil kebijakan pada system pemerintahan dan dapat membantu para pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi perbedaan kondisi perkembangan keadaan gender dan anak , mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan, mengidentifikasi masalah dan memilih opsi yang paling efektif dalam mengatasi kesenjangan dampak pembangunan antara laki-laki, perempuan dan anak.

Data gender dan anak juga merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan, yang digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran terhadap pencapaian kinerja pembangunan.

Peran perangkat daerah dalam penyediaan data gender dan anak sangatlah penting, karena data gender dan anak terkait langsung dengan semua SKPD di Kota Makassar terutama yang berhubungan langsung dengan isu gender dan anak seperti gender bidang pendidikan, gender bidang politik sosial dan hukum, Perlindungan Hak Perempuan, Pembangunan Kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta Pemenuhan Hak Anak.

Ketersediaan data gender dan anak pada tahun 2018 yang ditargetkan hanya sebanyak 40 %, hal ini tertuang dalam Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2019. Sejalan dengan terbentuknya Bidang Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru terbentuk pada tahun 2017 sesuai dengan Pasal 42 Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perwali Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan tetapi hal tersebut tidak menyebabkan ketersediaan data gender dan anak tidak terpenuhi sesuai target.

Peran perangkat daerah pada SKPD di Kota Makassar serta stake holder dalam penyediaan data gender dan anak meliputi prosentase partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, proposal kursi yang di perempuan di DPR, Partisipasi perempuan

dilembaga Swasta, Rasio KDRT, Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24, Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit, Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang di berikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, anak yang berhadapan dengan hukum, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Rasio APM perempuan/laki-laki di SD, Rasio APM Perempuan/laki-laki di SMP, Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA, Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program Sistim Data Gender dan Anak yang didukung oleh sejumlah kegiatan diantaranya : (1) Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak (2) Monitoring dan Evaluasi PUG (3) Penataan dan pendataan arsip pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (4) Workshop Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Data Terpadu (5) Pelatihan Sistem Pendataan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (6) Sosialisasi Peraturan dan kebijakan Perlindungan Perempuan (7) Penguatan Forum Data (8) Evaluasi Kota Layak Anak (9) Evaluasi Tugas Trafficking.

Adapun pencapaian indikator pada renja tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian	Tar get	Reali sasi	% Ca paian
Meningkatnya peran Perangkat Daerah dalam penyediaan data gender dan anak	Prosentase ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak	-	-	-	-	-	-	40	40	100%
Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Tersedianya data Terpilah Gender dan Anak	1 Dok.	1 Dok.	100%	1 Dok.	1 Dok.	100%	1 Dok.	1 Dok.	100%
Monitoring dan Evaluasi PUG	Terlaksananya monitoring & evaluasi PUG	4 triwul	4 triwul	100%	4 triwul	4 triwul	100%	4 triwul	4 triwul	100%

	disetiap SKPD	an	an		an	an		an	an	
Penataan dan pendataan arsip pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terselenggaranya Arsip Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	12 Dok	12 Dok	100	12 Keg	12 Keg	100 %
Pembuatan Panduan Pelayanan Publik Responsive Gender/Pro Anak	Adanya Pelayanan Publik Responsive Gender dan Pro Anak	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	-
Workshop Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Data Terpadu	Terlaksananya Workshop Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Data Terpadu	-	-	-	200 org	200 org	100%	200 org	200 org	100%
Pelatihan Sistem Pendataan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah peserta pelatihan Sistem Pendataan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap perempuan & anak	-	-	-	300 orang	300 orang	100%	400 orang	400 orang	100%
Sosialisasi Peraturan dan kebijakan Perlindungan Perempuan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Anak	-	-	-	300 orang	300 orang	100%	300 orang	300 orang	100%
Penguatan Forum Data	Meningkatnya Kapasitas Forum Data	-	-	-	-	-	-	51 SKPD	51 SKPD	100%
Sosialisasi Pendataan Kekerasan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pendataan Kekerasan Perempuan dan Anak	-	-	-	400 orang	400 orang	100%	-	-	-
Evaluasi Kota Layak Anak	Hasil Evaluasi Kota Layak Anak	-	-	-	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100%
Evaluasi Tugas Trafficking	Hasil Evaluasi Tugas Trafficking	-	-	-	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100%

Indikator kinerja pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilihat dari indikator program/ kegiatan Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak dari SKPD ditargetkan sebanyak 40% dan realisasinya sebanyak 40% atau sebanyak **20 SKPD**. Hasil pencapaian yang tercantum dalam tabel di atas tergolong amat baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase rasio pencapaian kinerja sebesar **40% (50 SKPD : 20 SKPD x 100)**.

Keberhasilan ini didukung oleh sejumlah kegiatan beserta komitmen SKPD untuk lebih mengoptimalkan agar semua SKPD memahami pentingnya pelaksanaan Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak

**Faktor Pendorong** : - Ketersediaan Anggaran yang memadai

- Koordinasi yang cukup baik antara SKPD terkait data gender dan anak
- Adanya pelatihan system pendataan yang dilaksanakan yang diikuti oleh perangkat daerah di seluruh SKPD

**Faktor Penghambat** : - Masih terbatasnya SDM pengelolaan data di SKPD  
 - Tidak adanya system data terpadu yang dibentuk khusus untuk data gender dan anak  
 - Masih terbatasnya ketersediaan data pilah gender dan anak di SKPD

**Rencana Tindak Lanjut** : - Mendorong SKPD untuk menyediakan data gender dan anak secara berkala dan terpilah  
 - Mendorong terbentuknya SIGA (System Informasi Gender dan Anak)  
 - Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan SKPD

**PencapaianTarget** : Jumlah Prosentase ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas telah direalisasikan anggaran sebesar pada :

**Sistim Data Gender dan Anak**

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2017		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian
-	-	-	-	-	-	2.086.904.800	1.982.059.800	94,98

**B. REALISASI ANGGARAN**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar pada Tahun 2018 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **25.095.357.000** Realisasi anggaran yang

direncanakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dengan rincian realisasi masing-masing program sebagai berikut :

No	PROGRAM/ KEGIATAN	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capa ian	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capa ian	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capa ian
1	BELANJA DAERAH	15.564.754.000	15.295.553.659	98,27	23.952.343.126	23.342.063.203	97,45	25.095.357.000	23.896.262.207	95,58
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.507.056.000	1.493.018.964	99,07	2.037.349.000	1.917.962.637	94,14	2.224.594.000	2.079.713.518	93,49
	Belanja Pegawai	2.507.056.000	1.493.018.964	99,07	2.037.349.000	1.917.962.637	94,14	2.224.594.000	2.079.713.518	93,49
3	BELANJA LANGSUNG	14.057.698.000	13.802.534.695	98,18	21.914.994.126	21.424.100.566	97,76	22.870.763.000	21.906.548.689	95,78
	Belanja Pegawai	2.178.100.000	2.178.100.000	100	3.062.900.000	3.060.150.000	99,91	3.407.325.000	3.223.075.000	94,59
	Belanja Barang & Jasa	11.485.598.000	11.230.434.695	97,78	18.440.903.100	17.996.289.566	97,59	19.261.509.000	18.505.726.009	96,08
	Belanja Modal	394.000.000	394.000.000	100	411.191.026	367.661.000	89,41	201.929.000	177.747.680	88,03

Realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp. **23.896.262.207** atau **95,58%** dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. **25.095.357.000** terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **2.079.713.518** atau 93,49% dari alokasi anggaran sebesar Rp. **2.224.594.000** dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. **21.906.548.689** atau 95,78% dari alokasi anggaran sebesar Rp. **22.870.763.000** dan secara umum DPPA Kota Makassar telah efisien dalam penggunaan anggaran.

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **2.079.713.518** merupakan realisasi Belanja Pegawai berstatus PNS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Sedangkan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. **21.906.548.689** terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.223.075.000 atau 94,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.407.325.000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 18.505.726.009 atau 96,08% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 19.261.509.000, dan Belanja Modal sebesar Rp.177.747.680 atau 88,031% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 201.929.000

## BAB IV. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017 serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian indikator pada 10 sasaran strategis dalam perjanjian kinerja untuk mencapai tiap-tiap tujuan Rencana Strategis 2014-2019 dikategorikan sangat baik. Berikut tingkat capaian masing-masing sasaran strategis tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar:

- a. Sasaran 1 : Tersedianya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar dengan indikator indeks pelayanan administrasi perkantoran mendapat predikat sangat baik dengan rasio pencapaian persentase rasio pencapaian sebesar 100%.
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang representatif dengan indikator cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik, mendapatkan predikat sangat baik dengan rasio persentase pencapaian sebesar 100 %.
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal dengan indikator indeks kehadiran pegawai. Mendapat predikat sangat baik dengan persentase rasio pencapaian sebesar 100%.
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikator cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya mendapat predikat sangat baik dengan rasio persentase pencapaian sebesar 100%.



- e. Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan, dengan rata-rata persentase rasio pencapaian 100% mendapat kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian dua indikator yaitu persentasi capaian kinerja yang termuat dalam *citizen charter* dan jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan.
- f. Sasaran 6 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan keterampilan perempuan dengan dengan indikator kinerja Jumlah perempuan kepala Rumah tangga miskin yang diberdayakan dengan rasio pencapaian sebesar 100%, mendapat predikat sangat baik.
- g. Sasaran 7 : Terjaminnya keadilan gender di berbagai bidang, menurunnya tindak kekerasan dan anak, meningkatnya kesejahteraan anak dengan indikator Jumlah SKPD yang perencanaan dan penggarannya responsive gender mendapat predikat sangat baik dengan persentase rasio pencapaian sebesar 125%.
- h. Sasaran 8 : Tercapainya penurunan tindak kekerasan dan eksplotasi terhadap perempuan dan anak indikator Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani mendapat predikat sangat baik dengan persentase pencapaian rasio pencapaian sebesar 108,86%.
- i. Sasaran 9 : Mewujudkan pengembangan kebijakan kelembagaan gender dan anak dengan indikator Kelurahan layak anak mendapat predikat sangat baik dengan persentase rasio pencapaian kinerja sebesar 100%.
- j. Sasaran 10 : Terlaksananya kesetaraan gender di berbagai bidang dengan indikator Indeks Pembangunan Gender mendapat predikat sangat baik dengan rasio pencapaian sebesar 101,19%.
- k. Sasaran 11 : Terlaksananya ketersediaan Data Informasi Gender dan Anak pada SKPD mendapat predikat sangat baik dengan rasio pencapaian sebesar 100%.

Rata-rata persentase rasio pencapaian dari 11 sasaran yang berada di dalam perjanjian kinerja tahun 2018 memperoleh nilai rata-rata **103,18%** dengan kategori sangat baik dan dapat dipakai sebagai acuan pada tahun-tahun mendatang.

## **B. KENDALA YANG DIHADAPI ATAS PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar adalah :

1. Masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat
2. Masih adanya anggapan bahwa isu perempuan dan anak hanya urusan DPPPA.
3. Belum optimalnya kapasitas SDM yang tersedia
4. Anggaran program anak di level kelurahan belum tersedia
5. Anak masih dianggap belum memiliki kemampuan
6. Masih terbatasnya SDM terlatih terkait PPRG di SKPD
7. Masih terbatasnya ketersediaan data pilah di semua SKPD
8. SKPD Kota Makassar menggunakan Instrumen Analisis Gender pada semua program.
9. Banyaknya materi – materi yang bermuatan pornografi yang membawa dampak buruk bagi masyarakat terutama generasi muda sehingga berpotensi terjadinya kejahatan seksual terhadap Perempuan dan Anak.
10. Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politis terhadap kesetaraan Gender di semua Sektor Pembangunan.

## **C. SARAN/REKOMENDASI PEMECAHAN**

Langkah-langkah ke depan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar:

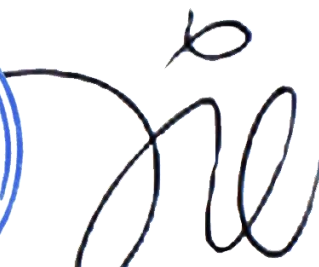
1. Program yang sama akan dikembangkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif
2. Mendorong SKPD untuk melakukan Gender analisis bukan hanya 1 (satu) program.
3. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota Focal Point
4. Updating data pilah secara berkala
5. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan SKPD
6. Peningkatan kapasitas terhadap anggota Tim Layanan
7. Koordinasi berkelanjutan dengan pihak terkait
8. Kampanye penyadaran tentang isu gender
9. Mendorong SKPD untuk memahami bahwa isu perempuan dan anak sudah menjadi isu bersama

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tahun 2018 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR



  
**Hj. TENRI A. PALALLO, S.Sos, M.Si**

Pangkat. Pembina TK.I  
NIP. 19680412 199603 2 005

**Lampiran – Lampiran :**

